



பிளிபிளூ ரூபாபிளூபி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிளிபிளூ ரூபாபிளூபி

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

தலைநகரம்: பிளிபிளூ ரூபாபிளூபி (பிளிபிளூ) - பிளிபிளூ (பிளிபிளூ) - பிளிபிளூ (பிளிபிளூ)
Jalan Patimura Nomor 77 Denpasar – Bali (80234), Telepon (0361) 223562
Laman : www.diskelkan.baliprov.go.id, Pos-el : diskelkan@baliprov.go.id

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

TAHUN 2026

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab Pembuat atau Penerbit Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Softcopy		
1.	Kedudukan/Domisili	Berisi tentang alamat lengkap dan kontak, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Dinas	2025	√	√	Aktif	https://diskelkan.baliprov.go.id
2.	Struktur Organisasi	Memuat struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Dinas	2023	√	√	Aktif	https://diskelkan.baliprov.go.id/struktur-organisasi



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



3.	Visi dan Misi	Memuat Informasi tentang Visi dan Misi Provinsi Bali	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2025	√	√	Aktif	https://diskelkann.baliprov.go.id/visi-misi
4.	Tugas Pokok dan Fungsi	Memuat informasi tentang tugas dan fungsi dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2023	√	√	Aktif	https://diskelkann.baliprov.go.id/tugas-dan-fungsi
5.	Maklumat Pelayanan	Memuat informasi tentang maklumat pelayanan publik yang telah disahkan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Dinas	Tahunan	√	√	Aktif	https://diskelkann.baliprov.go.id/maklumat-dan-standar-pelayanan
6.	Daftar Pejabat Struktural dan Fungsional	Memuat informasi tentang nama-nama pejabat dan pegawai	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Dinas	2025	√	√	Aktif	https://diskelkann.baliprov.go.id/struktur-organisasi
7.	Dokumen Rencana Strategis (Renstra)	Memuat tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas kelautan dan Perikanan	Sekretariat	Fungsional Perencana	2026	√	√	2 Tahun	https://diskelkann.baliprov.go.id/wajib-berkala
8.	Dokumen Rencana Kerja (Renja)	Memuat tentang Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra	Sekretariat	Fungsional Perencana	Tahunan	√	√	1 Tahun	https://diskelkann.baliprov.go.id/wajib-berkala
9.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memuat tentang pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah selama satu tahun, mencakup pencapaian sasaran strategis dan perbandingan antara rencana dan hasil	Sekretariat	Fungsional Perencana	Tahunan	√	√	1 Tahun	https://diskelkann.baliprov.go.id/wajib-berkala



10.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Memuat tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Berjalan	Sekretariat	Fungsional Perencana	Tahunan	√	√	1 Tahun	https://diskelkann.baliprov.go.id/wajib-berkala
11.	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Memuat tentang capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan	Sekretariat	Fungsional Perencana	Tahunan	√	√	1 Tahun	https://diskelkann.baliprov.go.id/wajib-berkala
12.	Neraca, CALK, & LRA	Memuat tentang informasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah di audit	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tahunan		√	1 Tahun	https://diskelkann.baliprov.go.id/wajib-berkala
13.	Standar Pelayanan	Memuat informasi tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Dinas	2026	√	√	Aktif	https://diskelkann.baliprov.go.id/maklumat-dan-standar-pelayanan
14.	Prosedur Perizinan dan Pelayanan	Memuat informasi tentang perizinan dan pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	Sekretariat	Sekretaris Dinas	2026	√	√	Aktif	https://diskelkann.baliprov.go.id/
15.	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Memuat informasi tentang pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	Sekretariat	Kepala Dinas	2026	√	√	Aktif	https://diskelkann.baliprov.go.id/pengadaan/
16.	Informasi Pengaduan Masyarakat	Memuat informasi tentang tata cara pengaduan masyarakat	Sekretariat	Sekretaris Dinas	2026	√	√	Aktif	https://diskelkann.baliprov.go.id/pengaduan-publik/



17.	Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan	Memuat informasi tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	Sekretariat	Sekretaris Dinas	2026	√	√	1 Tahun	https://diskelka.n.baliprov.go.id/daftar-informasi/
18.	Peraturan dan Kebijakan	Memuat informasi tentang peraturan dan kebijakan yang mengikat publik sesuai dengan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	Sekretariat	Sekretaris Dinas	2026	√	√	1 Tahun	https://diskelka.n.baliprov.go.id/peraturan/


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
 KEPALA DINAS
Ir. Putu Sumardiana, MP
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670714 199403 1 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





ကလေး၊ ပရိယာယ်၊ ကုသိုလ်၊ လူမှု၊ ဂုဏ်သိမ် - ကျမ်း (ပုံစံတစ်ခု)၊ ရဟန်းဂုဏ် (ဝတ္ထု)၊ မြေမြေခင်း

Laman : www.diskelkan.baliprov.go.id, Pos-el : dislautkan@baliprov.go.id

TAHUN 2026

No.	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan Pasal 6 ayat (3) huruf d: informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan. Pengecualian tunduk pada uji konsekuensi dan uji kepentingan publik (Pasal 19)	Selama masih berlaku sebagai kebijakan aktif; dikaji ulang setiap 5 tahun	Menghambat proses pengambilan keputusan dan kebijakan internal dinas	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan secara efektif
2.	Nota Dinas yang mengandung rahasia jabatan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan Pasal 6 ayat (3) huruf d: informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan. Hanya nota dinas yang secara substantif memuat	Selama substansi bersifat rahasia jabatan; dikaji ulang setiap 5 tahun	Menghambat proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



		rahasia jabatan yang dikecualikan; nota dinas administratif biasa tidak termasuk			
3.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum selesai dikuasai atau didokumentasikan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan Pasal 6 ayat (3) huruf d; UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pengecualian hanya berlaku selama dokumen benar-benar masih dalam proses; setelah final wajib masuk DIP	Sampai dokumen dinyatakan final dan selesai diproses	Menghambat proses penyusunan dan pengambilan kebijakan yang belum tuntas	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
4.	Arsip/dokumen Nota Dinas dan Memo Pimpinan yang bersifat sangat rahasia atau terbatas sesuai peraturan perundang-undangan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan Pasal 6 ayat (3) huruf d; UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pengecualian berlaku khusus untuk arsip yang secara eksplisit diklasifikasikan rahasia/terbatas oleh pejabat berwenang	Sesuai klasifikasi kearsipan yang ditetapkan; dikaji ulang berkala	Menghambat proses penyusunan dan pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
5.	Data Kesehatan, Keluarga, Rekening, Tabungan, Pinjaman Pegawai, Hak Kekayaan Pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat 3.c informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Tidak Terbatas	Bocornya Informasi yang Berkaitan dengan Informasi Pribadi sehingga Berpotensi Dapat Disalahgunakan	Menjaga Informasi yang Berkaitan dengan Informasi Pribadi untuk Keamanan Bersama
6.	Identitas Informan, Pelaporan, dan/atau saksi, yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a informasi yang menghambat proses penegakan hukum	Tidak Terbatas	Menghambat Proses Penegakan Hukum	Mengamankan Proses Penegakan Hukum
7.	Data koordinat, lokasi, dan peta sebaran sumber daya ikan serta kawasan konservasi yang belum dipublikasikan secara resmi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a; UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 7 ayat (1): pengelolaan sumber daya ikan wajib memperhatikan kelestarian. Keterbukaan lokasi spesifik berpotensi mendorong eksploitasi berlebihan	Selama data belum ditetapkan untuk dipublikasikan; dikaji ulang setiap 2 tahun	Mendorong eksploitasi sumber daya ikan secara berlebihan dan merusak kawasan konservasi	Menjaga kelestarian sumber daya ikan dan kawasan konservasi laut
8.	Informasi tentang strategi, rencana operasi, dan jadwal pengawasan/patroli di laut oleh Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a: informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum; UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terkait pengawasan sumber daya kelautan	Selama operasi/patroli berlangsung; dapat dibuka setelah operasi selesai	Menghambat efektivitas penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan	Mengamankan proses penegakan hukum di laut secara efektif



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



9.	Informasi terkait proses penyidikan, penyelidikan, dan penindakan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan yang sedang berjalan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a: informasi yang menghambat proses penegakan hukum; Pasal 17 huruf b: informasi yang dapat mengungkap identitas sumber informasi rahasia	Sampai proses hukum berkekuatan hukum tetap	Menghambat proses penyidikan dan berpotensi menggagalkan penindakan pelanggaran	Mengamankan proses penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan
----	---	---	---	---	---


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Ir. Putu Sumardiana, MP
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670714 199403 1 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

